LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR /PMK.03/2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 45/PMK.03/2009 TENTANG TATA CARA PENGAWASAN, PENGADMINISTRASIAN, PEMBAYARAN SERTA PELUNASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN/ATAU PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS PENGELUARAN DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI KAWASAN BEBAS KE TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN DAN PEMASUKAN DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN KE KAWASAN BEBAS

PEMBERITAHUAN PEMASUKAN/PENGELUARAN BARANG TRANSAKSI TERTENTU (PPBTT)

Nomor :
Tanggal :

A. Jenis Pemasukan/Pengeluaran ☐ 1. Dari Kawasan Bebas ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean
2. Dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas

B. Asal Barang ☐ 1. Luar Daerah Pabean 2. Tempat Lain Dalam Daerah Pabean 3. Kawasan Bebas 4. lainnya

C. Tanggal dikembalikan ke KB/TLDDP : (diisi pada saat BKP dikembalikan)

D. Data Pemberitahuan
Pengusaha Di Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP):

Nama :
NPWP/NPPKP :
Alamat :

Pengusaha Di Kawasan Bebas:

Nama :
NPWP/NPPKP :
Alamat :

Keterangan Barang:

No. PP FTZ 01 :
No. PP FTZ 03 :
Perusahaan Pengangkut Barang :
No.***Bill of Lading/Airways Bill/Delivery Order***:
Asal/Tujuan Barang :
Rencana Jangka Waktu
Penggunaan Barang :
Keterangan Penggunaan : Persewaan/Reparasi/Pameran/.....*)

No. Urut	Nama Barang	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin	
		Valas	Rupiah
Harga Jual			

Dengan ini menyatakan bahwa semua keterangan di atas benar adanya. Apabila di kemudian hari ditemukan keterangan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya maka saya bersedia dikenai sanksi berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

CATATAN DITJEN PAJAK
Telah sesuai dengan ketentuan persyaratan dan dokumen pelengkap.
....., (tanggal, bulan, tahun)
Mengetahui,
Pejabat/Pegawai DJP

Nama
NIP

....., tanggal.....
Nama
Jabatan

(***Pengusaha di TLDDP***)

Lembar ke-1/2 untuk Pengusaha di TLDDP/Pengusaha di KB;
Lembar ke-3/4 untuk KPP di KB/Kantor Pabean;
Lembar ke-5 untuk KPP di TLDDP.
Keterangan: *) coret yang tidak perlu

MENTERI KEUANGAN,

SRI MULYANI INDRAWATI

Pajak10-2009/RPMK/RPMK batum/Lamp 3 Perubahan PMK 45 191009 (rokum 17 Nov 2009)

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com